DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis ISSN. 2721-4907
Volume 7, Nomor 2, Oktober 2026

ANALISIS HAMBATAN MANAJEMEN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PAREPARE

Analysis of Management Barriers to Motor Vehicle Tax Revenue Collection on Local Own-Source Revenue of Parepare City

Irwan[1], Fitriyani Syukri[2], Deliavisa[3], Firman Syah[4], Sariana Damis[5]
Email: idrusiwan@yahoo.com[1], fitriyanisyukri19@gmail.com[2], deliavisa123@gmail.com[3], ramlan.firmansya@gmail.com[4], sarianadamis@gmail.com[5]
[1,3,4]Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
[2]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
[2]Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan manajemen penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Parepare serta menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022–2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri atas pegawai SAMSAT Parepare dan wajib pajak kendaraan bermotor. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai berbagai hambatan manajerial yang memengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Parepare meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat yang kurang stabil, keterbatasan pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital, serta kualitas pelayanan yang masih menghadapi kendala pada waktu tunggu pelayanan. Meskipun demikian, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tetap memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare selama periode 2022–2024. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan manajemen penerimaan pajak melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, optimalisasi sistem administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan guna memaksimalkan penerimaan pajak dan mendukung kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Manajemen Penerimaan Pajak, SAMSAT Parepare

Abstract

This study aims to analyze the management obstacles in Motor Vehicle Tax revenue at the SAMSAT Parepare Office and analyze Motor Vehicle Tax revenue toward Regional Original Revenue (PAD) in 2022–2024. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. This research was carried out through data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The informants in this study amounted to 12 people consisting of SAMSAT Parepare employees and motor vehicle taxpayers. The qualitative approach was used to gain a deep understanding of the various managerial obstacles that affect the receipt of Motor Vehicle Tax and its contribution to Regional Original Revenue. The results of the study showed that the main obstacles in the receipt of Motor Vehicle Tax at the SAMSAT Parepare Office include low awareness of taxpayers, unstable economic conditions of the community, limited use of digital-based administrative systems, and service quality that still faces obstacles in waiting time for services. Nevertheless, Motor Vehicle Tax revenues still make a significant contribution in supporting the increase in Regional Original Revenue (PAD) of Parepare City during the 2022–2024 period. Therefore, improved tax revenue management is needed through increasing taxpayer awareness, optimizing the administrative system, and improving service quality to maximize tax revenue and support regional financial independence.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Regional Original Revenue, Tax Revenue Management, SAMSAT Parepare

PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah. Dalam perspektif manajemen keuangan daerah, pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan bagian integral dari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemungutan pajak (Halim & Iqbal, 2022). Dalam kerangka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya dapat mendukung pembiayaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak hanya mencerminkan kinerja fiskal daerah, tetapi juga menjadi optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah (Aryani et al., 2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu sumber penerimaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, terutama dalam mendukung pengeluaran rutin serta pelaksanaan pembangunan daerah (Nugrah et al., 2023).

Oleh karena itu, sektor pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu komponen yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan dioperasionalkan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Keberadaan SAMSAT memiliki peran strategis dalam memicu kepatuhan para wajib pajak melalui tata kelola pelayanan yang berkualitas tinggi dapat memicu kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban fiskalnya, yang pada akhirnya berkontribusi positif pada pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor secara optimal (Anggun Prasiwi et al., 2025). Di samping itu, landasan yuridis pemungutan pajak ini bersandarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Regulasi tersebut mengamanatkan pengoptimalan pendapatan daerah guna mewujudkan kemandirian fiskal (Republik Indonesia, 2022).

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah, termasuk Kota Parepare, seharusnya menunjukkan tren peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor karena bertambahnya objek pajak yang dikenakan kewajiban perpajakan. Namun, kondisi empiris menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Parepare selama periode 2022–2024 masih berfluktuasi dan belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang tersedia. Berbagai hambatan masih ditemukan dalam proses pemungutan pajak, antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak (Zikri, 2024) kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil (Ana Anggraeni, 2024) keterbatasan sistem administrasi berbasis digital (Herdianto Gurning, 2024), serta kualitas pelayanan yang belum optimal, terutama terkait waktu tunggu pelayanan (Sitompul et al., 2025). Kondisi tersebut berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan berdampak pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4). Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerimaan pajak kendaraan bermotor dari berbagai perspektif. Yamin et al. (2025) menemukan bahwa hambatan pembayaran pajak kendaraan dinas dipengaruhi oleh lemahnya integrasi data dan prosedur administrasi yang belum efektif. Hamidi dan Rivandi (2023) serta Siregar et al. (2025) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran warga dalam membayar pajak memberikan dampak besar terhadap realisasi perolehan dana pajak kendaraan tersebut. Sementara itu, (Putri & Susilawati, 2023; Widowati, 2025; Fanida et al., 2025; Patria, 2024) lebih menekankan aspek kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dan efektivitas kebijakan perpajakan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian empat aspek hambatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, yaitu kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, sistem administrasi digital, dan kualitas pelayanan, dengan analisis perkembangan realisasi penerimaan serta kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare selama periode 2022–2024. Berbeda dari penelitian terdahulu yang berfokus pada aspek tertentu sesuai tujuan masing-masing, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memadukan perspektif pegawai SAMSAT dan wajib pajak serta data dokumentasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penggabungan tersebut menjadi kebaruan kontekstual penelitian karena memberikan gambaran mengenai hambatan penerimaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan pengalaman para informan dan kaitannya dengan perkembangan data penerimaan di lokasi penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi

bahan evaluasi bagi Kantor SAMSAT Parepare dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT di Parepare dan untuk mengkaji peran pemungutan pajak tersebut dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2022–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian manajemen keuangan daerah dan perpajakan, khususnya terkait hambatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan Kantor SAMSAT Parepare dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, penyempurnaan sistem administrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis hambatan manajemen penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kantor UPTD SAMSAT Parepare. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai berbagai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor, termasuk kesadaran wajib pajak dan kondisi ekonomi masyarakat, sistem administrasi, dan kualitas pelayanan. Penelitian dilaksanakan di Kantor UPTD SAMSAT Parepare pada periode April - Juni 2026.

Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap proses penerimaan pajak kendaraan bermotor. Informan penelitian berjumlah 12 orang, yang terdiri atas 4 pegawai SAMSAT dan 8 wajib pajak kendaraan bermotor. Data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi Kantor UPTD SAMSAT Parepare berupa data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah periode 2022–2024.

Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 2022). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pegawai SAMSAT dan wajib pajak, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hambatan Manajemen Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa hambatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Parepare masih menghadapi beberapa hambatan utama, yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, sistem administrasi yang belum optimal, dan kualitas pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai SAMSAT dan wajib pajak, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih menjadi faktor dominan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebagian wajib pajak menganggap pembayaran pajak belum menjadi prioritas dan kurang memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat mempunyai kontribusi yang sangat strategis dalam memengaruhi fluktuasi capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ketika kondisi ekonomi mengalami penurunan, masyarakat cenderung mendahulukan kebutuhan pokok dibandingkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pada aspek administrasi, meskipun layanan pembayaran berbasis digital telah diterapkan melalui aplikasi, pemanfaatannya masih belum optimal akibat keterbatasan pemahaman teknologi dan akses internet di sebagian masyarakat. Dari sisi pelayanan, masih ditemukan antrean pada waktu tertentu yang menyebabkan proses pembayaran pajak menjadi kurang efisien.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil analisis dokumentasi dari laporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Parepare, laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Parepare, penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode 2022–2024 menunjukkan tren yang positif. Analisis terhadap pencapaian target, pertumbuhan penerimaan, dan kontribusi pajak kendaraan bermotor mengindikasikan bahwa

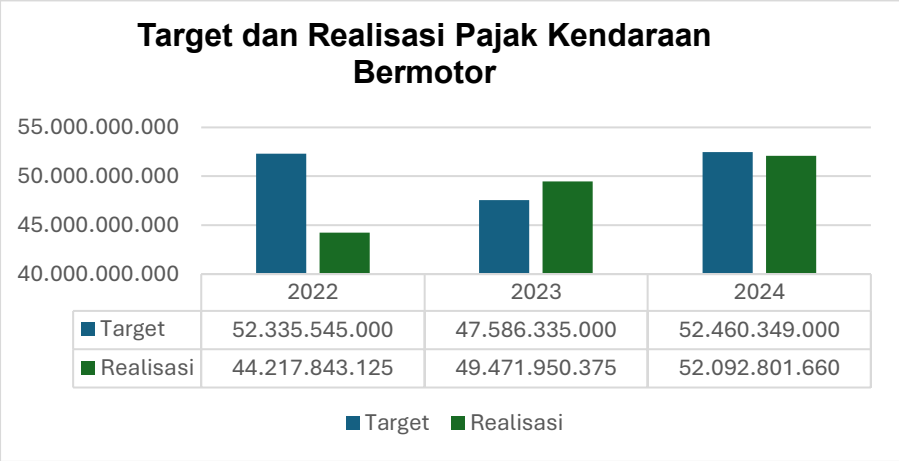
pajak kendaraan bermotor memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masih dipengaruhi oleh beberapa hambatan, antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, sistem administrasi, dan kualitas pelayanan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
2022	52.335.545.000	44.217.843.125	84.48 %
2023	47.586.335.000	49.471.950.375	103.96 %
2024	52.460.349.000	52.092.801.660	99.29 %

Sumber: Kantor UPTD Samsat Kota Parepare 2026

Berdasarkan Tabel 1 di atas, target beserta realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menunjukkan tren positif. Pada tahun 2022 target sebesar Rp52.335.545.000 dengan realisasi sebesar Rp44. 217.843.125 tingkat pencapaian target tersebut mencapai 84,48%. Pada tahun 2023 target ditetapkan sebesar Rp47.586.335.000 dengan realisasi sebesar Rp49.471.950.375 tingkat pencapaian tersebut mencapai 103,96%. Sedangkan pada tahun 2024 target penerimaan pajak kendaraan bermotor kembali meningkat menjadi Rp52.460.349.000 dengan realisasi sebesar Rp52.092.801.660 tingkat pencapaian menjadi 99,29%. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan dalam bentuk diagram.



Gambar 1. Grafik Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Kantor UPTD Samsat Kota Parepare (diolah peneliti 2026)

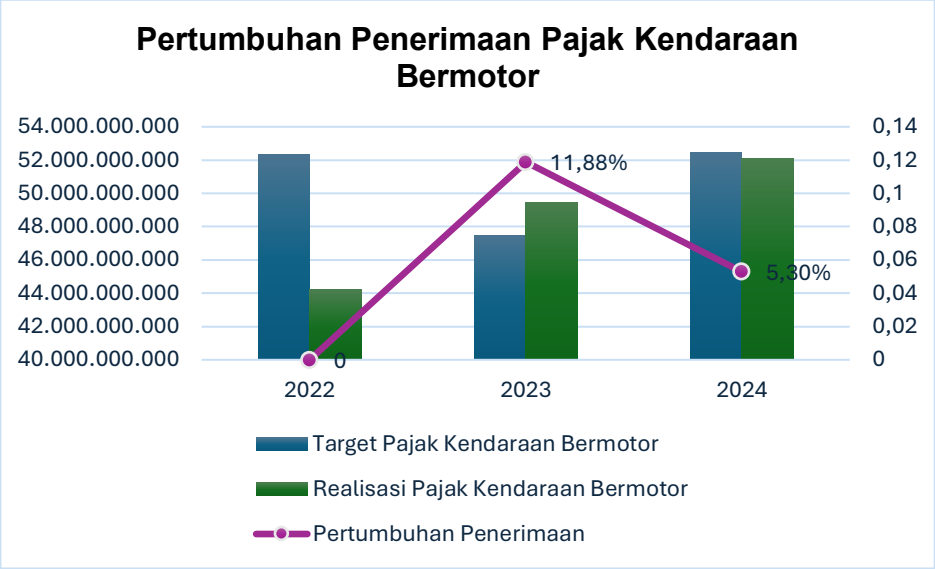
Tabel 2. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	Pertumbuhan Penerimaan
2021	38.763.750.000	36.842.244096	-
2022	52.335.545.000	44.217.843.125	20,02%
2023	47.586.335.000	49.471.950.375	11,88%
2024	52.460.349.000	52.092.801.660	5,30%

Sumber: Kantor UPTD Samsat Kota Parepare (diolah peneliti 2026)

Berdasarkan pada tabel 2 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Parepare mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2022–2024. Meskipun periode penelitian difokuskan pada tahun 2022–2024, data realisasi tahun 2021 digunakan sebagai tahun dasar (base year) untuk menghitung pertumbuhan penerimaan tahun 2022. Oleh karena itu, tahun 2021 tidak dianalisis sebagai objek penelitian, melainkan sebagai data pembanding dalam perhitungan laju pertumbuhan. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp44.217.843.125. Pada tahun 2023, penerimaan meningkat menjadi Rp49.471.950.375 atau bertambah sebesar Rp5.254.107.250 dengan tingkat pertumbuhan 11,88%. Selanjutnya, pada tahun 2024 realisasi penerimaan kembali meningkat menjadi

Rp52.092.801.660 atau bertambah sebesar Rp2.620.851.285 dibandingkan tahun 2023, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,30%. Data tersebut membuktikan bahwa realisasi target pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Parepare terus mengalami peningkatan secara berkelanjutan tanpa mengalami penurunan selama periode penelitian. Berikut adalah bentuk diagram pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor.



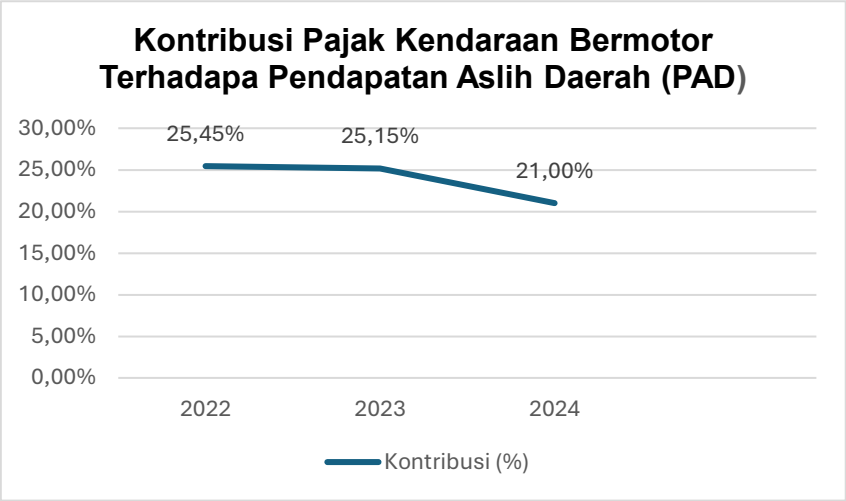
Gambar 2. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Sumber: Kantor UPTD Samsat Kota Parepare (diolah peneliti 2026)

Tabel 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Jumlah Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi (%)
2022	44.217.843.125	173.758.437.058,66	25,45 %
2023	49.471.950.375	196.738.798.401,95	25,15 %
2024	52.092.801.660	248.070.790.193,86	21,00 %

Sumber: Kantor UPTD Samsat Kota Parepare (diolah peneliti 2026)

Berdasarkan Tabel 3, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 mencapai 25,45%, kemudian menurun menjadi 25,15% pada tahun 2023 dan 21,00% pada tahun 2024. Rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah selama periode 2022–2024 sebesar 23,87%. Penurunan tersebut terjadi meskipun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat dari Rp44.217.843.125 pada tahun 2022 menjadi Rp49.471.950.375 pada tahun 2023 dan Rp52.092.801.660 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor belum sebanding dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Hal tersebut terlihat dari realisasi pendapatan asli daerah yang meningkat dari Rp173.758.437.058,66 pada tahun 2022 menjadi Rp196.738.798.401,95 pada tahun 2023 dan Rp248.070.790.193,86 pada tahun 2024. Dengan demikian, penurunan persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor, terutama pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah tumbuh lebih cepat dibandingkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, sumber peningkatan pendapatan asli daerah yang menyebabkan perubahan tersebut belum dapat dipastikan tanpa data terperinci mengenai komponen penerimaan daerah lainnya. Temuan ini menunjukkan perlunya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan sistem administrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan agar penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat meningkat secara berkelanjutan.



Gambar 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor
Sumber: Kantor UPTD Samsat Kota Parepare (diolah peneliti 2026)

Pembahasan

Hambatan Manajemen Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD SAMSAT Parepare masih menghadapi beberapa hambatan utama, yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, pemanfaatan sistem administrasi digital yang belum optimal, serta kualitas pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Rendahnya kesadaran wajib pajak menjadi hambatan yang paling dominan berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Sebagian masyarakat masih memandang pembayaran pajak sebagai beban administratif, bukan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Temuan ini sejalan dengan Anggraeni (2024) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pemahaman terhadap manfaat pajak, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, semakin besar pula kemungkinan mereka memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Temuan tersebut juga memperkuat penelitian (Zikri, 2024) yang membuktikan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak memberikan dampak positif bagi optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Demikian pula penelitian (Hamidi & Rivandi, 2023) serta (Siregar et al., 2025) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan penerimaan pajak daerah. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi yang berkelanjutan terbukti mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban perpajakan (Anggun Prasiwi et al., 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa peningkatan kesadaran masyarakat merupakan salah satu strategi utama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Selain faktor kesadaran, kondisi ekonomi masyarakat juga berdampak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa ketika kondisi ekonomi mengalami penurunan, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan membayar pajak kendaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi memiliki hubungan erat dengan kepatuhan perpajakan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Ana Anggraeni, 2024) yang menjelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Artinya, peningkatan penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh kebijakan perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi sistem administrasi berbasis digital melalui layanan aplikasi belum dimanfaatkan secara optimal. Hambatan tersebut disebabkan oleh keterbatasan literasi digital masyarakat, akses internet yang belum merata, serta masih adanya wajib pajak yang lebih memilih melakukan pembayaran secara langsung di kantor SAMSAT. Temuan ini mendukung penelitian (Herdianto Gurning, 2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan perpajakan belum sepenuhnya efektif apabila tidak diikuti dengan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Aryani et al. (2024) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perpajakan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena

itu, keberhasilan transformasi digital ini tidak sekadar ditentukan oleh penyediaan infrastruktur teknologi, melainkan juga dipengaruhi oleh kapasitas dan kesiapan masyarakat dalam mengoperasikan fasilitas layanan yang tersedia.

Dari aspek pelayanan, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masih menghadapi kendala, terutama pada waktu tunggu pelayanan saat jumlah wajib pajak meningkat. Meskipun pelayanan di SAMSAT Parepare pada umumnya telah menunjukkan capaian yang positif, antrean yang panjang dalam waktu tertentu tetap menimbulkan ketidaknyamanan bagi wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sitompul et al., 2025) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Layanan yang cepat, transparan, dan praktis terbukti meningkatkan kepuasan publik. Kepuasan tersebut menjadi faktor utama yang mendorong kemauan masyarakat untuk menuntaskan kewajiban perpajakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi melalui analisis terpadu terhadap empat hambatan manajemen penerimaan pajak kendaraan bermotor, yaitu kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, pemanfaatan sistem administrasi digital, dan kualitas pelayanan, yang dikaitkan dengan perkembangan realisasi penerimaan serta kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare selama periode 2022–2024. Berbeda dari penelitian terdahulu yang membahas aspek kepatuhan, kondisi ekonomi, atau digitalisasi pelayanan secara terpisah sesuai fokus masing-masing, penelitian ini mengintegrasikan perspektif pegawai SAMSAT dan wajib pajak dengan data penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk memberikan gambaran kontekstual mengenai keterkaitan berbagai hambatan tersebut dengan capaian penerimaan daerah. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi temuan kualitatif dan data penerimaan dalam menganalisis hambatan pajak kendaraan bermotor di Kota Parepare, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan yang sesuai dengan kondisi setempat.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Parepare periode 2022-2024 memiliki fungsi strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya tingkat pemungutan pajak tersebut membuktikan bahwa pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi signifikan bagi pembiayaan wilayah terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. Namun, belum tercapainya target penerimaan pada beberapa periode menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal. Kondisi ini menguatkan teori Halim dan Iqbal (2022) yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (PAD) sehingga optimalisasi manajemen pengelolaannya akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Temuan studi membuktikan bahwa pemenuhan target pemungutan pajak kendaraan bermotor ditentukan oleh derajat kepatuhan wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor SAMSAT Parepare. Rendahnya realisasi penerimaan pada tahun 2022 dapat dikaitkan dengan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, keberhasilan melampaui target pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kondisi ekonomi masyarakat yang diikuti oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta perbaikan kualitas pelayanan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi objek pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku wajib pajak dan efektivitas pelayanan publik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fanida et al., 2025) yang menyatakan bahwa optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Penelitian (Hamidi & Rivandi, 2023) juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kesamaan hasil tersebut memperkuat argumentasi bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerimaan pajak daerah. Namun demikian, temuan dalam studi ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan turut memberikan kontribusi yang tidak kalah penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela.

Pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tetap positif selama periode penelitian menunjukkan pajak kendaraan bermotor memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi, melambatnya laju pertumbuhan pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan belum berlangsung secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan sosialisasi

perpajakan, pemanfaatan layanan digital, penyederhanaan prosedur pembayaran, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Implementasi berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sekaligus mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan pajak kendaraan bermotor memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, peningkatan efektivitas pengelolaan pajak kendaraan bermotor tidak hanya berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal dan kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan manajemen penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Parepare meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, kendala penggunaan sistem administrasi digital, dan kualitas pelayanan. Meskipun penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap menjadi sumber pendapatan yang strategis, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Parepare menunjukkan penurunan selama 2022–2024. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, edukasi perpajakan, serta perbaikan pelayanan dan sistem administrasi.

Saran

Optimalisasi manajemen penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memerlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat melalui media sosial dan radio, seperti penyampaian jadwal jatuh tempo pajak, prosedur pembayaran, manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta pengingat pembayaran sebelum jatuh tempo. Selain itu, pengembangan layanan administrasi berbasis digital perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur pembayaran, penyediaan panduan penggunaan layanan digital, dan pemberian informasi yang jelas mengenai tahapan pembayaran hingga penyelesaian administrasi di Kantor SAMSAT Parepare. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga perlu memperkuat sinergi melalui evaluasi data tunggakan, penyampaian pemberitahuan kepada wajib pajak yang belum membayar, serta penerapan program insentif atau pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, melibatkan lebih banyak informan, serta mengkaji faktor-faktor lain, seperti digitalisasi pelayanan, literasi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur signifikansi pengaruh masing-masing faktor hambatan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ana Anggraeni, A. Y. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Peran Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Reviu Akutansi Bisnis Dan Indonesia*, *Vol. 8 No.* https://doi.org/10.18196/rabin.v8i3.24924

Anggun Prasiwi, Gladys Lhexya Faradhila, Mila Zulficka Dewi, & Adinda Zakiya Putri Rahmandhani. (2025). Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2020 – 2024. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, *2*(2), 292–303.

Aryani, R. . A. I., Muliani, M., & Azzahra, B. S. R. (2024). Pengaruh Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Gerung. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, *10*(4), 663–669. https://doi.org/10.29303/jseh.v10i4.692

Ayu Widowati, J. (2025). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan* [IPDN].

Fanida, E. H., Fitrie, R. A., Maruf, M. F., Shafira, K., Abdillah, D. C., Fatima, F., Handsant, A., Ahmad, S., & Iswahyudi, D. (2025). Kota Madiun Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Daya Saing: Jurnal Ilmu Manajemen*, *11(2)*. https://doi.org/10.35446/dayasaing.v11i2.2114

Halim, A., & Iqbal, M. (2022). Bunga rampai: Manajemen keuangan daerah (ed. 4). Salemba Empat.

Hamidi, R., & Rivandi, M. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, *1*(2). https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1302

Herdianto Gurning, P. D. Y. S. (2024). Sosialisasi, Penerapan Samsat Drive Thru dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, *Vol. 34No.*, 1044–1052. https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i04.p17

Laylani Amelia Putri, F., & Susilawati. (2023). Analisis perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi Covid-19 dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, *3*(1), 1–17. https://doi.org/10.31961/ijaaf.v3i1.1481

Mohd. Yamin, Bagio Kadaryanto, R. L. (2025). Analisis hambatan dan penanganan pajak kendaraan dinas di rokan hilir. *Lancang Kuning Law Journal*, *2*(2), 177–188. https://doi.org/10.31849/lklw.v1i01.23281

Nugrah, N., Jumriani, J., & Firmansyah, F. (2023). Analisis derajat desentralisasi fiskal ditinjau dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota Parepare. *Journal AK-99*, *3*(2), 188–194.

Patria, Y. M. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Program Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah di SAMSAT Kabupaten Tegal. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *6*(2), 273–280. https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3586

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).

Siregar, A. L., Syafina, L., & Nurwani, N. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (SAMSAT) Sipirok. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, *9*(2), 378–388. https://doi.org/10.36555/jasa.v9i2.2889

Sitompul, Dewi, S. T. A. (2025). Analisis Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, *Vol. 4 No.* https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.394

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Zikri, A. &. (2024). Pengaruh Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *The Journal Of Taxation Tax Center*, *Vol.5 No.2*, 45–59. https://doi.org/10.24014/jot.v5i2.35638